

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENURUNKAN ANGKA PREVALENSI STUNTING DI KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

FAHRI RAMADHAN

NPP 32.0978

Asdaf Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email : 32.0978@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Dr. Jona Bungaran Basuki Sinaga, S.STP., S.AP., M.Si.

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** The prevalence rate of stunting in Mamuju Regency, West Sulawesi Province, is still relatively high even though various policies have been implemented. This problem is multidimensional, influenced by low public awareness, early marriage culture, and limited infrastructure and basic services. Local government efforts to reduce stunting face various obstacles in their implementation. **Purpose:** This study aims to analyze the implementation of local government policies in reducing stunting rates in Mamuju Regency. **Method:** This study uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and documentation studies. Data analysis was carried out using Muchlis Hamdi's policy implementation theory with indicators of productivity, linearity, and efficiency. **Results:** The implementation of stunting reduction policies has been carried out through specific and sensitive interventions convergently across sectors. Supporting factors include political commitment, supportive regulations, and the existence of active networks. However, obstacles were found in the form of low community participation, limited human resources and technology, and weak coordination between sectors. The local government responded to this challenge by strengthening the capacity of cadres, optimizing monitoring technology, and cross-sector advocacy. **Conclusion:** The implementation of stunting reduction policies in Mamuju Regency has been carried out in accordance with national guidelines that are aligned with local conditions, but still needs strengthening in multi-actor synergy, community education, and development of supporting infrastructure to accelerate stunting reduction in a sustainable manner.

**Keywords:** Policy Implementation, Stunting, Local Government, Mamuju Regency

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Angka prevalensi stunting di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, masih tergolong tinggi meskipun berbagai kebijakan telah diimplementasikan. Permasalahan ini bersifat multidimensional, dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat, budaya pernikahan dini, serta keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar. Upaya pemerintah daerah dalam menurunkan stunting menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Mamuju. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan Muchlis Hamdi dengan indikator produktivitas, linearitas, dan efisiensi. **Hasil/Temuan:** Implementasi kebijakan penurunan stunting telah

dilakukan melalui intervensi spesifik dan sensitif secara konvergen lintas sektor. Faktor pendukung meliputi komitmen politik, regulasi yang mendukung, dan keberadaan jejaring kerja yang aktif. Namun, ditemukan hambatan berupa rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta lemahnya koordinasi antarsektor. Pemerintah daerah merespons tantangan ini melalui penguatan kapasitas kader, optimalisasi teknologi pemantauan, dan advokasi lintas sektor. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Mamuju telah berjalan sesuai dengan pedoman nasional yang diselaraskan dengan kondisi lokal, namun masih perlu penguatan dalam sinergi multi-aktor, edukasi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur pendukung guna percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Stunting, Pemerintah Daerah, Kabupaten Mamuju

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan di bawah standar menurut umur berdasarkan indeks WHO (Atamou et al., 2023). Dampaknya tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga mempengaruhi perkembangan kognitif anak secara permanen, sehingga berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh asupan gizi yang buruk, pengasuhan yang tidak memadai, serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang terbatas.

Secara global, stunting masih menjadi tantangan besar. Pada tahun 2022, sebanyak 148,1 juta balita mengalami stunting, atau sekitar 22,3% dari total balita di dunia. Asia dan Afrika mendominasi kontribusi kasus tersebut masing-masing sebesar 52% dan 43%. Di Indonesia, meskipun terdapat tren penurunan prevalensi dari 27,67% pada tahun 2019 menjadi 21,5% pada tahun 2023, angka tersebut masih jauh dari target RPJMN 2024 sebesar 14%. Artinya, dalam waktu satu tahun, pemerintah harus menurunkan prevalensi stunting sebesar 7,5%, lebih tinggi dari rata-rata penurunan lima tahun sebelumnya yang hanya sebesar 6,17%.

**Gambar 1.1**

### Keluarga Berisiko Stunting Di Provinsi Sulawesi Barat



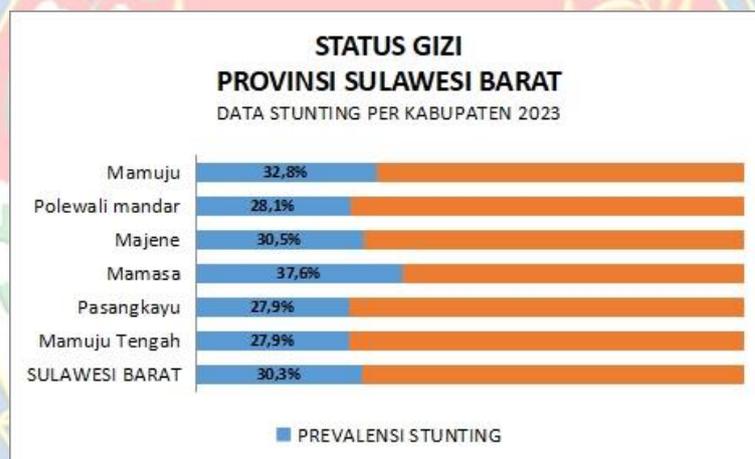
Sumber: Laporan TPPS Sulbar, 2024

Provinsi Sulawesi Barat termasuk dalam tiga besar provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia, bersama dengan Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara. Meskipun menunjukkan penurunan dari 35% pada 2022 menjadi 30,4% pada 2023, angka tersebut masih mengindikasikan kondisi serius yang perlu penanganan khusus. Kabupaten Mamuju sendiri mencatat angka prevalensi stunting yang tinggi, yaitu 32,8%, menjadikannya sebagai daerah prioritas intervensi. Tingginya angka stunting di wilayah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah budaya pernikahan dini yang masih tinggi. Pada tahun 2023, terdapat 2.314 pernikahan usia dini dari total 195.834 pernikahan di Sulawesi Barat, dengan Kabupaten Mamuju menjadi salah satu penyumbang tertinggi.

Tingginya angka pernikahan dini berkontribusi pada risiko stunting, mengingat banyaknya keluarga muda dengan tingkat pendidikan rendah dan akses layanan kesehatan yang terbatas. Namun demikian, data juga menunjukkan bahwa jumlah keluarga berisiko stunting mengalami penurunan yang signifikan di semua kabupaten, termasuk di Mamuju, yang turun dari 25.742 keluarga pada 2021 menjadi 19.663 pada 2023. Meski demikian, data pengukuran balita pada Desember 2023 menunjukkan bahwa Mamuju memiliki jumlah balita stunting tertinggi, yaitu 5.268 dari 18.208 balita yang diukur.

**Gambar 1.2**

**Status Gizi Indonesia**



Sumber: Laporan SKI, 2023

Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah pusat telah menyusun Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (Stranas PPS) sejak 2018. Strategi ini berfokus pada lima pilar utama, yakni: komitmen politik dan visi kepemimpinan, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, konvergensi program, ketahanan pangan dan gizi, serta monitoring dan evaluasi. Implementasi di daerah melibatkan berbagai OPD seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, DP3A, Dinas Ketahanan Pangan, dan BKKBN, yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung kelima pilar tersebut. Dengan kompleksitas permasalahan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Mamuju, serta mengidentifikasi hambatan dan strategi yang dapat dilakukan secara konvergen dan berkelanjutan.

## 1.2 Gap Penelitian

Meskipun laporan telah menunjukkan tren penurunan prevalensi stunting secara global, prevalensi stunting di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah tertentu seperti Nusa Tenggara Timur, tetap tinggi dan menjadi perhatian serius. Studi oleh Atamou et al. (2023) memberikan kontribusi penting dengan mengidentifikasi determinan lokal stunting seperti pengetahuan ibu, pola asuh, dan jarak kelahiran di desa-desa locus stunting. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana faktor-faktor sosial budaya lokal, akses terhadap layanan kesehatan, dan intervensi pemerintah setempat secara spesifik mempengaruhi prevalensi stunting. Selain itu, penelitian tersebut menggunakan desain potong lintang (cross-sectional) yang membatasi pemahaman mengenai hubungan kausal antara determinan dan stunting. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lanjutan yang lebih mendalam, menggunakan desain longitudinal atau campuran, serta mempertimbangkan konteks sosial dan kebijakan lokal untuk merumuskan intervensi yang lebih efektif dan kontekstual dalam penanggulangan stunting.

## 1.3 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai implementasi kebijakan penanganan stunting di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada efektivitas koordinasi lintas sektor, keterlibatan masyarakat, serta adaptasi terhadap konteks lokal. Nurva dan Maharani (2023) dalam studi kasusnya di Kabupaten Brebes menemukan bahwa meskipun pelaksanaan kebijakan telah sesuai regulasi dan didukung kerja sama antarpemangku kepentingan, masih terdapat banyak hambatan yang menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Senada dengan itu, Sahroji et al. (2022) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan Dinas Kesehatan di Kabupaten Karawang belum optimal akibat program yang belum berjalan secara maksimal dan dampaknya belum dirasakan langsung oleh masyarakat.

Permasalahan koordinasi juga diidentifikasi oleh Febrian dan Yusran (2021) di Kota Padang, di mana koordinasi antar lembaga belum terintegrasi dan terbatas pada sosialisasi, tanpa diikuti tindakan konkret. Hambatan lainnya mencakup keterbatasan regulasi, anggaran, dan kesadaran lintas sektor. Di Kabupaten Malang, Maulana et al. (2022) menekankan bahwa pandemi COVID-19 menjadi faktor utama yang mengganggu pelaksanaan intervensi gizi spesifik karena kegiatan rutin seperti posyandu dan layanan puskesmas tidak dapat berjalan normal. Fenomena serupa juga ditemukan di Kabupaten Bandung, di mana Sunaryo et al. (2021) mencatat bahwa meskipun kegiatan percepatan telah dilaksanakan, hasilnya belum efektif dalam menurunkan angka stunting karena pembatasan akibat pandemi.

Namun demikian, terdapat pula studi yang menunjukkan hasil positif. Rosanti (2023) dalam penelitiannya di Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting oleh Dinas Kesehatan berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2021–2023). Penelitian ini menyoroti pentingnya strategi yang terarah dan konsisten dalam mendukung program nasional.

Sementara itu, studi-studi mutakhir memperkaya perspektif dengan menekankan pentingnya pendekatan berbasis lokal dan teknologi. Utami et al. (2025) menunjukkan bahwa kearifan lokal seperti budaya gotong royong di Bantul berkontribusi signifikan dalam efektivitas intervensi gizi. Prayitno et al. (2025) menyoroti pentingnya ketahanan pangan sebagai prediktor utama keberhasilan pencegahan stunting di daerah agraris. Sari et al. (2025) menegaskan bahwa pendidikan ibu sangat berpengaruh dalam menurunkan prevalensi stunting, sedangkan Kusumawati et al. (2025) menunjukkan efektivitas aplikasi digital dalam mendukung pemantauan gizi anak. Terakhir, Astuti et al. (2025) menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan modal sosial dalam membentuk kebijakan

penanganan stunting yang kontekstual dan adaptif terhadap nilai-nilai budaya lokal. Secara keseluruhan, penelitian terdahulu menegaskan bahwa keberhasilan penanganan stunting memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, teknologi, dan kearifan lokal, dengan dukungan regulasi yang kuat dan koordinasi multisektor yang berkelanjutan.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian mengenai implementasi kebijakan penanganan stunting di Indonesia sebelumnya banyak menyoroti hambatan seperti kurang optimalnya pelaksanaan program (Sahroji et al., 2022), lemahnya koordinasi lintas sektor (Febrian & Yusran, 2021), serta gangguan akibat pandemi COVID-19 yang menghambat intervensi gizi spesifik (Maulana et al., 2022; Sunaryo et al., 2021). Studi di Kabupaten Brebes oleh Nurva dan Maharani (2023) menunjukkan pelaksanaan kebijakan yang sesuai regulasi namun terkendala hambatan yang menghambat pencapaian tujuan, sementara Rosanti (2023) di Kabupaten Rembang melaporkan hasil positif berupa penurunan signifikan angka stunting dalam tiga tahun terakhir. Penelitian-penelitian mutakhir menekankan pentingnya pendekatan berbasis kearifan lokal, ketahanan pangan, pendidikan ibu, teknologi digital, dan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan stunting (Utami et al., Prayitno et al., Sari et al., Kusumawati et al., Astuti et al., 2025). Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini di Kabupaten Mamuju menggunakan pendekatan analisis implementasi kebijakan dengan teori Muchlis Hamdi yang menitikberatkan pada indikator produktivitas, linearitas, dan efisiensi, serta mengintegrasikan faktor-faktor sosial budaya spesifik seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan budaya pernikahan dini sebagai hambatan utama. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor pendukung seperti komitmen politik dan jejaring kerja aktif serta respons pemerintah daerah dalam penguatan kapasitas kader, optimalisasi teknologi pemantauan, dan advokasi lintas sektor. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap pelaksanaan kebijakan penurunan stunting, khususnya dalam menghadapi tantangan sosial budaya dan kelembagaan yang unik di Kabupaten Mamuju.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Mamuju

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Metode kualitatif dipilih berdasarkan pandangan Sugiyono (2017) yang menyatakan bahwa pendekatan ini tepat digunakan untuk memahami situasi alamiah serta menggambarkan fenomena sosial secara komprehensif. Pendekatan ini juga berlandaskan pada filsafat postpositivistik atau paradigma interpretatif, yang menganggap bahwa realitas sosial bersifat kompleks dan tidak dapat dipecah ke dalam variabel-variabel terpisah, melainkan harus dipahami secara menyeluruh dan kontekstual (Ridwan & Tungka, 2024). Pendekatan ini umumnya lebih sesuai dan efisien dalam situasi di mana jumlah responden relatif terbatas (Nurdin & Hartati). Selanjutnya, menurut Fatimah (2019), pendekatan kualitatif lebih cenderung digunakan untuk penelitian yang berkaitan dengan masalah sosial karena dalam penelitian kualitatif data dan konteks penelitian lebih ditekankan. Tujuan dari penggunaan pendekatan ini adalah untuk memaparkan fakta, masalah, dan data lapangan terkait pelaksanaan kebijakan penurunan stunting yang bersifat kontekstual dan kompleks.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, sementara data

sekunder diambil dari berbagai dokumen resmi seperti laporan survei gizi, indeks khusus penanganan stunting, serta jurnal-jurnal terkait (Simangunsong, 2017). Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti mengembangkan pertanyaan sesuai kebutuhan lapangan (Esterberg dalam Sugiyono, 2021), observasi terhadap pelaksanaan program di lapangan (Creswell, 2017), dan studi dokumen sebagai pelengkap untuk menguatkan data yang diperoleh (Sugiyono, 2021).

Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling (Sugiyono, 2021; Simangunsong, 2017). Informan kunci adalah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena mereka memegang peran strategis dalam kebijakan, penganggaran, serta monitoring program penurunan stunting. Selain itu, petugas puskesmas dan posyandu dipilih secara purposive karena terlibat langsung dalam pelaksanaan program di lapangan dan memiliki pengetahuan teknis yang penting. Tim Penggerak PKK dan lembaga swadaya masyarakat juga dipilih sebagai informan karena peran mereka dalam sosialisasi dan evaluasi program secara independen. Teknik snowball sampling digunakan untuk mendapatkan informan dari kelompok masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang sulit diidentifikasi secara awal, sehingga informan awal dapat merekomendasikan individu yang relevan dan berpengaruh (Simangunsong, 2017).

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri merupakan instrumen utama untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data (Nasution dalam Sugiyono, 2021). Oleh karena itu, peneliti dilengkapi dengan pedoman wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan relevan. Analisis data dilakukan secara sistematis menggunakan software Atlas.ti yang membantu dalam mengelola dan mengorganisasi data secara kreatif dan fleksibel namun tetap terstruktur (Warsono et al., 2022). Tahapan analisis data ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna dari data yang besar sehingga menghasilkan temuan yang mendalam dan valid.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten mamuju dalam menurunkan angka prevalensi stunting di tingkat daerah yang dibahas dalam penelitian ini mengusung konsep implementasi yang dicetuskan oleh Prof. Muchlis Hamdi, MPA., Ph.D. dalam bukunya yang bertajuk Kebijakan Publik (Proses, Analisis, dan Partisipasi). dalam buku tersebut disebutkan bahwa kebijakan publik dapat diuraikan dalam tiga dimensi yang menggambarkan kebijakan terlaksana dan berkembang yang mencakup produktivitas, linearitas dan efisiensi. Penelitian ini dilakukan dengan menghimpun informasi, data dan fakta di lapangan melalui wawancara, pengamatan langsung (observasi), dan studi dokumentasi.

#### **3.1 Produktivitas Implementasi Kebijakan**

Produktivitas dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Mamuju mencerminkan efektivitas pemanfaatan sumber daya seperti tenaga kesehatan, anggaran, dan program intervensi. Peningkatannya dilakukan melalui optimalisasi pendataan keluarga berisiko, pencatatan capaian, serta peningkatan kualitas intervensi gizi spesifik dan sensitif. Pengelolaan produktivitas yang baik menjadi kunci untuk mencapai hasil yang signifikan sesuai dengan target kebijakan.

##### **1. Jumlah Pencapaian Kelompok Sasaran**

Dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Mamuju, produktivitas menjadi indikator utama keberhasilan yang ditunjukkan melalui capaian terhadap kelompok sasaran seperti ibu hamil, balita, dan keluarga berisiko stunting. Upaya yang dilakukan meliputi

pemberian makanan tambahan (PMT), sosialisasi pola asuh gizi, intervensi kesehatan ibu hamil, serta peningkatan akses sanitasi dan air bersih. Capaian produktivitas ini tidak hanya dilihat dari banyaknya intervensi yang dilakukan, tetapi juga dari dampak nyata terhadap target sasaran, seperti penurunan angka prevalensi stunting.

Data menunjukkan bahwa angka stunting di Kabupaten Mamuju sempat meningkat dari 30,3% pada 2021 menjadi 33,8% di 2022, namun turun sedikit menjadi 32,8% di 2023 (SSGI, 2024). Meskipun penurunan ini menunjukkan kemajuan, angka tersebut masih lebih tinggi dari tahun awal, yang menandakan perlunya penguatan intervensi. Berdasarkan data e-PPGBM, dari 22.711 balita, hanya 62% yang telah diukur, dengan 5.625 balita teridentifikasi mengalami stunting.

Keberhasilan program intervensi spesifik yang dilaksanakan Dinas Kesehatan dan Dinas PPKB menunjukkan hasil yang cukup optimal. Seluruh puskesmas yang ditargetkan telah melaksanakan berbagai program seperti PMT bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang, kelas ibu hamil dan balita, serta layanan ASI eksklusif. Namun, masih terdapat tantangan seperti tidak terealisasinya implementasi sistem surveilans gizi elektronik di 7 puskesmas. Di sisi lain, Dinas PPKB telah melaksanakan audit kasus stunting dan pelayanan kesehatan bagi calon pasangan usia subur dengan cakupan 480 kader aktif.

Sementara itu, program intervensi sensitif yang menysasar faktor penyebab tidak langsung stunting juga menunjukkan capaian yang menggembirakan. Dinas Kesehatan berhasil menjalankan program STBM di seluruh wilayah prioritas, dengan capaian kesertaan KB jangka panjang (MKJP) yang melebihi target. Dinas PPKB juga sukses dalam pengadaan sarana ketahanan keluarga dan integrasi program lintas sektor melalui Kampung KB. Dinas Sosial merealisasikan bantuan sosial kepada lebih dari 8.000 keluarga penerima manfaat, sementara Dinas Pendidikan telah memenuhi target ketersediaan tenaga pendidik PAUD.

Namun, sektor infrastruktur seperti Dinas PUPR masih menghadapi kendala dalam pencapaian target sambungan rumah air bersih dan tangki septik. Di sisi lain, Kementerian Agama berhasil melibatkan 2.850 calon pengantin dan remaja dalam edukasi pranikah berbasis pencegahan stunting. Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pertanian turut mendukung intervensi dengan mempromosikan konsumsi ikan dan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan bergizi. Secara keseluruhan, program intervensi spesifik dan sensitif di Kabupaten Mamuju telah menunjukkan koordinasi lintas sektor yang baik dan capaian yang cukup optimal. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan, khususnya dalam aspek infrastruktur dan pemanfaatan teknologi informasi, pencapaian ini mencerminkan langkah progresif menuju target penurunan stunting yang berkelanjutan.

### **3.2 Linearitas dalam Implementasi Kebijakan**

Linearitas mengacu pada kesesuaian antara prosedur dan pelaksanaan kebijakan dengan standar yang telah ditetapkan. Aspek yang dianalisis meliputi:

#### **1 . Prosedur implementasi kebijakan penurunan angka stunting**

Implementasi kebijakan penurunan angka stunting di Kabupaten Mamuju telah mengacu pada lima pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Pilar pertama, yang berfokus pada peningkatan komitmen dan koordinasi, menunjukkan kemajuan yang signifikan. Kabupaten Mamuju telah menyusun regulasi dan mengintegrasikan isu stunting dalam dokumen perencanaan daerah dan desa secara menyeluruh. Aksi konvergensi lintas sektor melalui TPPS juga telah berjalan, mencerminkan adanya komitmen politik yang kuat dari pemerintah daerah. Namun, koordinasi di tingkat kecamatan masih terbatas dengan hanya

31,61% dari total rapat yang terlaksana, yang menandakan perlunya penguatan mekanisme koordinasi antarlevel pemerintahan.

Pada pilar kedua, yakni perubahan perilaku masyarakat melalui kampanye pencegahan stunting, pencapaian belum optimal. Kampanye baru menjangkau 50% dari target, dan praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) hanya tercapai 22% dari sasaran. Kendati terdapat peningkatan pada praktik stop Buang Air Besar Sembarangan (84,7%), pendampingan keluarga berisiko stunting masih sangat rendah (20,29%). Selain itu, promosi konsumsi ikan sebagai sumber protein nyaris tidak berjalan dengan capaian hanya 0,21%. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perubahan perilaku masih membutuhkan pendekatan yang lebih strategis dan intensif.

Pilar ketiga berkaitan dengan integrasi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Kabupaten Mamuju telah menunjukkan keterlibatan aktif Bappeda dan OPD lintas sektor, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, sosial, pertanian, dan lainnya. Program intervensi gizi spesifik dan sensitif telah direalisasikan dengan tingkat pencapaian yang tinggi, termasuk pendampingan calon pengantin dan layanan PMT bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang. Namun demikian, distribusi peran antar-OPD masih belum merata, dan beberapa indikator program belum sepenuhnya terealisasi karena kendala logistik dan teknis di lapangan.

Selanjutnya, dalam pilar keempat yang mencakup ketahanan pangan dan peningkatan akses gizi, pencapaian Kabupaten Mamuju cukup beragam. Beberapa program seperti pemanfaatan pekarangan dan promosi konsumsi ikan telah dimulai, namun realisasinya masih jauh dari target. Alokasi anggaran untuk program ketahanan pangan baru mencapai 46%, menunjukkan masih adanya keterbatasan pembiayaan untuk mendukung intervensi yang bersifat jangka panjang. Peran OPD seperti Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan, serta PUPR penting untuk diperkuat agar upaya ini berdampak langsung pada kelompok sasaran.

Terakhir, pada pilar kelima yang berfokus pada sistem pemantauan dan evaluasi terpadu, capaian Kabupaten Mamuju masih rendah. Hanya 3,96% dari kebijakan data telah tersedia, dan konvergensi dalam monitoring serta evaluasi baru tercapai 15% dari target. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem informasi berbasis data yang seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan dan perencanaan program. Kolaborasi dengan perguruan tinggi telah membantu dalam pengumpulan data dan pelatihan kader, namun hasil riset belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah. Diperlukan penguatan sistem surveilans elektronik serta mekanisme evaluasi yang lebih sistematis agar implementasi kebijakan dapat dipantau secara real time dan berbasis bukti. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan penurunan angka stunting di Kabupaten Mamuju telah menunjukkan progres di beberapa sektor kunci, terutama dalam regulasi, intervensi gizi, dan kolaborasi lintas sektor. Namun, tantangan masih besar dalam hal perubahan perilaku masyarakat, pembiayaan program, serta penguatan sistem data dan pemantauan. Untuk mencapai target nasional secara optimal, Kabupaten Mamuju perlu memperbaiki koordinasi teknis, memperkuat edukasi masyarakat, dan membangun sistem informasi yang lebih responsif dan terintegrasi.

## **2. Alokasi waktu dalam implementasi kebijakan penurunan angka stunting**

Alokasi waktu merupakan elemen strategis dalam keberhasilan implementasi kebijakan penurunan angka stunting, karena berkaitan langsung dengan efektivitas, konsistensi, dan keberlanjutan program. Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, alokasi waktu tidak hanya menyangkut pelaksanaan program, tetapi juga mencakup jadwal evaluasi dan pemantauan yang terstruktur. Pemantauan berkala menjadi penting untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tetap relevan dan adaptif terhadap

perubahan kondisi lapangan maupun kebutuhan masyarakat sasaran. Oleh karena itu, seluruh kegiatan harus memiliki rentang waktu pelaksanaan yang jelas, terjadwal, dan terukur.

Di Kabupaten Mamuju, penerapan alokasi waktu dalam program penurunan stunting telah diintegrasikan secara sistematis dalam berbagai aktivitas layanan dasar, salah satunya melalui kegiatan Posyandu. Setiap Puskesmas menjalankan kegiatan Posyandu minimal satu kali setiap bulan secara rutin. Dalam agenda bulanan ini, dilaksanakan serangkaian kegiatan seperti pemantauan pertumbuhan anak, penyuluhan gizi, pemeriksaan kesehatan ibu dan balita, hingga pemberian makanan tambahan. Jadwal pelaksanaan yang konsisten memungkinkan terwujudnya kesinambungan dalam pemantauan status gizi anak dan pemberian intervensi dini bila ditemukan gejala stunting atau gangguan tumbuh kembang.

Konsistensi jadwal kegiatan Posyandu ini juga berdampak positif terhadap partisipasi masyarakat. Masyarakat menjadi terbiasa dan memiliki ekspektasi waktu yang jelas untuk mendapatkan layanan, sehingga memperkuat keterlibatan mereka dalam program. Selain itu, pelaksanaan yang rutin mempermudah petugas kesehatan dalam merencanakan distribusi sumber daya dan pelaporan capaian. Dengan frekuensi bulanan, evaluasi kondisi anak dapat dilakukan secara berkala, memungkinkan penyesuaian program secara lebih responsif terhadap dinamika di lapangan.

Namun demikian, meskipun alokasi waktu sudah berjalan cukup baik pada tingkat layanan dasar seperti Posyandu, tantangan tetap ada dalam aspek koordinasi waktu antar-OPD dan pelaksanaan kegiatan lintas sektor lainnya. Beberapa agenda koordinatif seperti rapat TPPS tingkat kecamatan atau pelatihan kader masih belum terlaksana secara merata dan tepat waktu. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengendalian waktu, pelaporan, dan penjadwalan ulang kegiatan yang tertunda menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan dan efektivitas kebijakan penurunan stunting di daerah. Sinkronisasi alokasi waktu antarprogram dan antarinstansi perlu diperkuat agar seluruh intervensi berjalan serempak dan saling mendukung dalam satu kerangka waktu yang terstruktur.

### 3. Penggunaan anggaran

Penanganan stunting sebagai isu prioritas pembangunan di Kabupaten Mamuju ditopang oleh kebijakan anggaran yang strategis dan menyeluruh. Pemerintah daerah telah menetapkan pendekatan lintas sektor yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam perencanaan dan pelaksanaan program penurunan stunting. Komitmen ini tercermin dalam besarnya anggaran yang dialokasikan untuk berbagai intervensi gizi spesifik dan sensitif, peningkatan kualitas layanan kesehatan, penguatan ketahanan pangan, serta edukasi keluarga. Seluruh OPD terkait didorong untuk menyusun kegiatan dengan target capaian yang konkret dan waktu pelaksanaan yang terukur.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Mamuju mengalokasikan anggaran sebesar Rp 22,08 miliar untuk program penurunan stunting, namun realisasi anggaran hanya mencapai Rp 19,97 miliar. Ketidaksihinggaan antara rencana dan realisasi, khususnya pada Dinas Kesehatan yang hanya merealisasikan sekitar 72,8% dari anggarannya, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efisiensi pelaksanaan program. Di sisi lain, beberapa OPD seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas PUPR menunjukkan kinerja anggaran yang optimal dengan realisasi 100%, menandakan bahwa kegiatan yang dirancang telah dijalankan secara efektif sesuai dengan perencanaan.

Untuk tahun 2024, alokasi anggaran program penurunan stunting meningkat menjadi Rp 33,31 miliar yang disebar ke berbagai sektor. Dinas Kesehatan menjadi pelaksana program terbesar dengan anggaran lebih dari Rp 10 miliar yang digunakan untuk kegiatan seperti

penyediaan makanan tambahan berbasis pangan lokal, kelas ibu hamil dan balita, pelatihan kader, dan layanan rujukan balita gizi buruk. Di samping itu, Dinas PPKB juga memegang peranan penting dengan alokasi anggaran Rp 2,7 miliar untuk penyuluhan, pendampingan calon pengantin, audit kasus stunting, dan penguatan ketahanan keluarga.

OPD lainnya seperti Dinas PUPR mendapatkan alokasi terbesar berikutnya, yakni sebesar Rp 19,6 miliar, difokuskan pada pembangunan dan peningkatan sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang layak—intervensi sensitif yang sangat penting dalam menurunkan angka stunting. Dinas Pertanian juga mengambil bagian melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan rumah tangga berisiko stunting. Dinas Pendidikan dengan pelatihan guru PAUD serta pembentukan gugus tugas PAUD HI, dan Dinas PMD melalui peningkatan kapasitas kelembagaan desa, turut memperkuat pendekatan intervensi dari sisi edukatif dan pemberdayaan masyarakat. Kementerian Agama juga mengambil peran melalui kegiatan bimbingan perkawinan calon pengantin dengan anggaran Rp 65,7 juta, sebagai upaya pencegahan stunting dari hulu melalui kesiapan berkeluarga. Dinas Sosial dengan anggaran Rp 123 juta memfokuskan diri pada pengelolaan data keluarga miskin dan pemberian bimbingan sosial untuk kelompok rentan. Penggunaan anggaran tahun 2024 menunjukkan pendekatan yang lebih terintegrasi dan kolaboratif dibandingkan tahun sebelumnya. Setiap OPD telah diberi tanggung jawab yang jelas sesuai bidang tugasnya, dengan dana yang bersumber dari berbagai alokasi, seperti DAK Fisik dan Non-Fisik, DAU, APBD, serta APBN. Hal ini menandakan sinergi antara pusat dan daerah yang semakin solid dalam mengatasi stunting secara sistemik.

Secara keseluruhan, penggunaan anggaran di Kabupaten Mamuju telah diarahkan secara progresif untuk menciptakan intervensi yang berlapis, mulai dari promosi kesehatan, pelayanan langsung kepada sasaran, hingga peningkatan infrastruktur dasar. Tantangan ke depan terletak pada optimalisasi realisasi anggaran, efektivitas pelaksanaan program di lapangan, dan penguatan pemantauan serta evaluasi agar dana yang telah dialokasikan benar-benar menghasilkan perubahan signifikan dalam menurunkan prevalensi stunting di wilayah tersebut.

#### **4. Distribusi lokasi intervensi stunting**

Kabupaten Mamuju telah ditetapkan sebagai salah satu wilayah prioritas nasional dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Barat. Komitmen ini diwujudkan melalui penetapan lokus intervensi yang sistematis dan berbasis data, dengan mempertimbangkan tingkat prevalensi stunting serta kebutuhan intervensi spesifik di masing-masing desa dan kelurahan. Penentuan lokus tidak hanya mencerminkan identifikasi daerah dengan beban stunting tertinggi, tetapi juga bertujuan untuk mengarahkan sumber daya dan intervensi secara lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Pada tahun 2023, terdapat 24 desa/kelurahan yang menjadi fokus intervensi stunting. Wilayah-wilayah tersebut tersebar di beberapa kecamatan seperti Mamuju, Kalukku, Simboro, Tapalang, dan Papalang. Intervensi yang dilakukan mencakup pemantauan pertumbuhan anak, penyuluhan gizi, pemberian makanan tambahan, serta peningkatan sanitasi dan edukasi masyarakat. Pendekatan multisektor ini dirancang untuk mengatasi berbagai determinan stunting secara komprehensif, baik dari sisi kesehatan, lingkungan, maupun sosial ekonomi.

Memasuki tahun 2024, jumlah lokus intervensi menurun menjadi 18 desa. Penurunan ini menunjukkan adanya hasil positif dari upaya intervensi yang telah dilakukan sebelumnya, di mana beberapa desa menunjukkan penurunan signifikan dalam prevalensi stunting dan tidak lagi termasuk dalam kategori prioritas. Meski demikian, masih terdapat sejumlah desa yang memerlukan perhatian intensif, seperti Bambu (56,62%), Tadui (54,41%), dan Botteng (51,28%) yang mencatat prevalensi tertinggi. Distribusi wilayah intervensi tahun ini mencakup

kecamatan Mamuju, Simboro, Kalukku, Tapalang, Tapalang Barat, dan Papalang, dengan berbagai strategi yang difokuskan pada peningkatan cakupan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan data serta sistem pelaporan.

Pada tahun 2025, strategi intervensi diarahkan secara lebih adaptif dengan menyoar 11 desa prioritas yang memiliki prevalensi stunting masih tinggi atau mengalami stagnasi. Fokus difokuskan pada desa-desa seperti Bambu, Tadui, Botteng, dan Bebanga yang meskipun telah menerima intervensi sebelumnya, tetap mencatat angka stunting di atas 50%. Kecamatan Kalukku menjadi wilayah dengan jumlah lokus terbanyak tahun ini, yaitu empat desa, yang mengindikasikan bahwa wilayah tersebut masih menghadapi tantangan serius dalam penurunan angka stunting.

Pendekatan berbasis evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya menjadi dasar penetapan lokus intervensi tahun 2025. Data dari TPPS Kabupaten Mamuju menunjukkan bahwa selain prevalensi, pertimbangan strategis lain seperti kesiapan sumber daya lokal, partisipasi masyarakat, dan efektivitas intervensi sebelumnya juga menjadi acuan. Dengan semakin terfokusnya wilayah intervensi, diharapkan program dapat lebih terarah, efisien, dan berdampak nyata terhadap penurunan angka stunting. Keberhasilan pengurangan jumlah lokus dari 24 desa di tahun 2023 menjadi hanya 11 desa di tahun 2025 mencerminkan progres yang menjanjikan sekaligus menunjukkan efektivitas model intervensi kolaboratif lintas sektor yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju. Ke depan, tantangan yang perlu diantisipasi adalah menjaga konsistensi program di desa yang telah keluar dari lokus agar tidak mengalami kemunduran, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi di seluruh tingkatan. Strategi pelibatan masyarakat dan pemanfaatan data yang akurat menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan hasil yang telah dicapai dan mewujudkan target nasional dalam menurunkan stunting di bawah 14% pada tahun 2024.

## **5. Peran pelaksana kebijakan**

Penurunan angka stunting di Kabupaten Mamuju merupakan prioritas strategis yang memerlukan pendekatan lintas sektor dan kerja sama antarlembaga. Peran pelaksana kebijakan dalam konteks ini menjadi sangat vital, tidak hanya terbatas pada implementasi teknis, tetapi juga mencakup perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh program yang berjalan. Dalam rangka memastikan bahwa upaya penurunan stunting dapat dilakukan secara holistik dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Mamuju membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sebagai wadah koordinasi dan integrasi antar pemangku kepentingan.

TPPS Kabupaten Mamuju dipimpin langsung oleh Bupati sebagai Ketua Pengarah dan Wakil Bupati sebagai Ketua Pelaksana. Keterlibatan pimpinan daerah dalam posisi strategis ini mencerminkan tingginya komitmen pemerintah dalam menjadikan isu stunting sebagai agenda pembangunan prioritas. Selain unsur pemerintah daerah, TPPS juga melibatkan berbagai lembaga vertikal seperti DPRD, Kejaksaan, Pengadilan, TNI, dan Polri sebagai bagian dari pengarah, untuk memperkuat legitimasi dan dukungan lintas sektor terhadap program yang dijalankan.

Pelaksanaan program penurunan stunting di lapangan dilakukan melalui pembagian peran yang terstruktur dalam beberapa bidang kerja. Bidang Intervensi Spesifik dan Sensitif diketuai oleh Dinas Kesehatan, dengan dukungan dari Dinas Sosial, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Kelautan, PUPR, dan OPD terkait lainnya. Bidang ini bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan kesehatan dasar, perbaikan gizi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penguatan ketahanan pangan sebagai fondasi utama dalam mencegah dan menangani kasus stunting.

Bidang Komunikasi, Perubahan Perilaku, dan Pendampingan Keluarga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan literasi masyarakat tentang pola asuh anak dan gizi keluarga. Koordinasi bidang ini dipimpin oleh Asisten II Setda dengan partisipasi aktif dari Dinas Pendidikan, Dinas PPPA, Dinas Kominfo, serta Kementerian Agama. Melalui pendekatan edukatif dan komunikasi publik, perubahan perilaku masyarakat diarahkan pada praktik pengasuhan yang lebih sehat dan responsif terhadap tumbuh kembang anak.

Selanjutnya, Bidang Koordinasi, Konvergensi, dan Perencanaan serta Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi (Monev), dan Knowledge Management menjadi penggerak utama dalam memastikan efektivitas program melalui perencanaan berbasis data, pelaporan terintegrasi, serta evaluasi berkala. Kolaborasi antara Bappeda, Dinas PMD, Bagian Hukum, dan instansi teknis lainnya bertujuan untuk menjamin keterpaduan kebijakan serta keberlanjutan program di semua tingkatan pemerintahan.

Khusus untuk aspek manajemen data dan evaluasi, keberadaan instansi seperti Poltekkes dan Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat validitas data serta efektivitas monitoring kinerja program. Kehadiran tenaga ahli dari sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk dari perguruan tinggi, menambah kualitas pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy making), sekaligus memperluas ruang partisipasi akademisi dan lembaga riset dalam proses penanggulangan stunting. Dengan struktur TPPS yang menyeluruh dan representatif dari seluruh sektor pembangunan, Kabupaten Mamuju menempatkan upaya penurunan stunting sebagai misi bersama yang menuntut kolaborasi lintas bidang. Keberhasilan program ini bergantung pada sinergi antarinstansi, ketersediaan sumber daya, serta peran aktif masyarakat sebagai pelaku utama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung pertumbuhan optimal bagi anak-anak.

### **3.3 Efisiensi dalam Implementasi Kebijakan**

Efisiensi kebijakan diukur dari kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya (tenaga, dana, teknologi, dan aset) untuk mencapai tujuan kebijakan. Aspek yang dianalisis meliputi:

#### **1. Tingkat Pendayagunaan tenaga pelaksana**

Tingkat pendayagunaan tenaga pelaksana dalam program penurunan stunting di Kabupaten Mamuju menunjukkan upaya yang cukup optimal dengan melibatkan berbagai unsur di tingkat lapangan. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan berperan sebagai koordinator utama, sementara fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan posyandu menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan intervensi. Dengan jumlah posyandu sebanyak 425 unit, di mana 416 masih aktif, dan didukung oleh 1.948 kader posyandu yang tersebar luas, keberlangsungan layanan kesehatan dasar dan edukasi gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta balita dapat berjalan secara efektif. Kader posyandu yang dekat dengan masyarakat berperan tidak hanya sebagai penyedia layanan kesehatan, tetapi juga sebagai agen edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mencegah stunting secara berkelanjutan. Selain itu, dukungan penyuluh keluarga berencana (PKB) melalui Dinas PPKB juga sangat krusial dalam memperkuat intervensi berbasis keluarga dan masyarakat. Kabupaten Mamuju memiliki 68 penyuluh KB yang tersebar di 11 kecamatan dengan mayoritas berada pada jenjang terampil dan mahir, yang bertugas langsung dalam edukasi keluarga, pencatatan data, serta supervisi program. Distribusi penyuluh yang menempatkan konsentrasi terbesar di kecamatan dengan angka prevalensi stunting tinggi seperti Kalukku, Tapalang, dan Mamuju mencerminkan respons yang adaptif terhadap kebutuhan wilayah. Meskipun demikian, terdapat tantangan terkait keterbatasan tenaga penyuluh pada jenjang madya dan utama yang berperan dalam pengembangan strategi dan koordinasi lintas sektor, serta kebutuhan peningkatan kapasitas dan motivasi kader

posyandu yang sebagian besar bersifat sukarela. Oleh karena itu, penguatan pelatihan, insentif yang memadai, serta peningkatan peran penyuluh di tingkat strategis menjadi kunci untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan intervensi stunting. Sinergi antara tenaga pelaksana, pemanfaatan data yang terintegrasi, serta dukungan multisektor menjadi faktor penting dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mamuju secara berkelanjutan.

## **2. Pemanfaatan teknologi dalam pemantauan dan pelaporan data stunting**

Pemanfaatan teknologi dalam pemantauan dan pelaporan data stunting di Kabupaten Mamuju telah menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan akurasi dan efektivitas program penurunan stunting. Salah satu aplikasi utama yang digunakan adalah e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Gizi Terpadu (Sigizi Terpadu) yang dikembangkan oleh Direktorat Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Melalui e-PPGBM, tenaga kesehatan di lapangan dapat secara rutin mencatat data individu balita, mendeteksi secara dini kasus gizi buruk atau kurang, serta memantau distribusi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) secara lebih sistematis dan terstruktur. Dengan adanya aplikasi ini, pemerintah daerah seperti Kabupaten Mamuju dapat mengakses data secara berkala dan terintegrasi dari tingkat posyandu hingga nasional, yang memungkinkan evaluasi dan penyesuaian intervensi gizi berjalan lebih tepat sasaran. Dashboard aplikasi yang menampilkan data dalam bentuk angka dan grafik memudahkan pemantauan tren prevalensi stunting dan penilaian efektivitas program secara real-time. Selain e-PPGBM, teknologi juga dimanfaatkan melalui portal Sistem Informasi Keluarga (SIGA) yang dikelola oleh BKKBN, berfungsi sebagai pusat data terpadu keluarga yang mendukung pemetaan dan perencanaan program berbasis data keluarga. SIGA memperkuat pemantauan dengan menyediakan informasi menyeluruh tentang kondisi keluarga, yang krusial dalam menentukan intervensi multisektoral untuk penanganan stunting. Dengan demikian, integrasi teknologi informasi dalam pemantauan dan pelaporan stunting di Kabupaten Mamuju tidak hanya meningkatkan kualitas data dan efisiensi pelaksanaan program, tetapi juga mempercepat pencapaian target penurunan stunting secara berkelanjutan melalui pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan data terkini.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Mamuju menunjukkan bahwa program ini telah berjalan dengan mengacu pada kebijakan nasional dan disesuaikan dengan kondisi lokal melalui intervensi spesifik dan sensitif yang melibatkan berbagai sektor. Pemerintah daerah mampu mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi e-PPGBM dan SIGA, untuk pemantauan dan pelaporan data gizi secara real-time yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurva dan Maharani (2023) di Kabupaten Brebes yang menekankan pentingnya koordinasi efektif antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan stunting, meskipun beberapa daerah lain seperti Karawang dan Padang masih menghadapi hambatan koordinasi dan keterbatasan pelaksanaan program. Selain itu, efektivitas penggunaan teknologi dalam mendukung pemantauan gizi di Mamuju menguatkan hasil studi Kusumawati et al. (2025) yang menunjukkan peran penting aplikasi digital dalam mempercepat intervensi gizi anak. Berbeda dengan beberapa daerah yang terganggu oleh pandemi COVID-19 seperti Malang dan Bandung yang mengalami penurunan efektivitas program, Kabupaten Mamuju mampu menjaga keberlangsungan layanan melalui keterlibatan posyandu aktif dan penyuluh keluarga berencana yang tersebar di seluruh wilayah. Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan penurunan stunting memerlukan sinergi multisektor, pemanfaatan teknologi yang tepat, serta pendekatan yang adaptif terhadap

kondisi dan budaya lokal, sejalan dengan hasil studi Utami et al. (2025) dan Astuti et al. (2025) yang menyoroti pentingnya modal sosial dan kearifan lokal dalam penguatan program percepatan penurunan stunting.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Mamuju telah berjalan sesuai dengan pedoman nasional yang diselaraskan dengan kondisi lokal. Pemerintah daerah telah menjalankan berbagai program intervensi spesifik yang langsung menasar masalah gizi, seperti pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dan balita, pemantauan tumbuh kembang anak di Posyandu, serta pemberian suplemen gizi. Selain itu, program intervensi sensitif juga diterapkan dengan melibatkan sektor sosial dan ekonomi, seperti penyediaan sanitasi yang layak, edukasi kesehatan reproduksi, dan peningkatan ketahanan pangan keluarga melalui program pertanian berkelanjutan. Hal ini menunjukkan pendekatan multisektor yang komprehensif dalam penanganan stunting.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan ini. Aplikasi e-PPGBM dan SIGA dimanfaatkan secara optimal untuk memantau kondisi gizi masyarakat secara real-time, sehingga data yang diperoleh dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya gizi seimbang dan pola asuh yang baik juga terus digalakkan melalui berbagai media, seperti Posyandu, sekolah, dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat serta tokoh agama. Pendekatan ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat tantangan dalam mencapai target yang lebih optimal, antara lain terkait dengan koordinasi antar sektor, ketersediaan sumber daya, dan jangkauan intervensi di daerah terpencil. Oleh karena itu, perlu upaya berkelanjutan dalam meningkatkan sinergi lintas sektor, memperkuat kapasitas pelaksana program, serta memperluas cakupan intervensi agar dampak penurunan stunting dapat dirasakan secara lebih signifikan dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju.

#### **Keterbatasan penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar bersumber dari laporan resmi pemerintah daerah dan dokumen terkait, sehingga terdapat kemungkinan adanya bias pelaporan atau keterbatasan data lapangan yang belum sepenuhnya tercakup. Kedua, penelitian ini lebih fokus pada aspek implementasi kebijakan dan kurang mendalami faktor-faktor sosial budaya yang mungkin memengaruhi keberhasilan program penurunan stunting secara mendalam. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif dan belum melakukan analisis kuantitatif yang lebih mendalam untuk mengukur dampak langsung dari intervensi terhadap penurunan angka stunting.

#### **Arah masa depan penelitian**

Untuk arah masa depan, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengadopsi pendekatan mixed-method yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan penurunan stunting. Penelitian juga perlu mengeksplorasi peran serta kearifan lokal, norma sosial, dan perilaku masyarakat dalam keberhasilan intervensi, serta dampak pandemi atau kondisi luar biasa lainnya terhadap pelaksanaan program. Selain itu, pengembangan teknologi dan inovasi dalam pemantauan dan evaluasi juga menjadi bidang penting yang perlu diteliti lebih lanjut untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara real-time.

Dengan demikian, penelitian masa depan dapat memberikan rekomendasi yang lebih spesifik dan aplikatif untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan program penanganan stunting di Kabupaten Mamuju maupun wilayah lain dengan konteks serupa.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terimakasih dan apresiasi mendalam kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan akses dalam pengumpulan data penelitian. Penghargaan juga disampaikan kepada semua pihak yang berkontribusi dan mendukung kelancaran serta keberhasilan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, S. J. W., Dwiningwarni, S., & Atmojo, S. (2025). Modeling environmental interactions and collaborative interventions for childhood stunting: A case from Indonesia. *Dialogues in Health*, 6, Article 100206. <https://doi.org/10.1016/j.dialog.2025.100206>
- Atamou, L., Rahmadiyah, D. C., Hassan, H., & Setiawan, A. (2023). Analysis of the determinants of stunting among children aged below five years in stunting locus villages in Indonesia. *Healthcare (Switzerland)*, 11(6), Article 810. <https://doi.org/10.3390/healthcare11060810>
- Creswell, J. W. (2017). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fatimah, F., Wulandari, & Aprianti, K. (2023). Pengaruh analisis jabatan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Koperindag Kota Bima. *LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren*, 1(2), 105–111. <https://doi.org/10.35870/ljit.v1i2.1684>
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan publik: Proses, analisis, dan partisipasi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Kusumawati, P. D., Nurhidayah, R., & Kurniasari, D. (2025). The effectiveness of integrating the Lumbung Hidup and Nutritional Rangers mobile applications in preventing stunting among underprivileged families in Kediri Regency. *Healthcare in Low-Resource Settings*, 13(1), Article 13258. <https://doi.org/10.4081/hls.2024.13258>
- Maulana, I. N. H., Sholihah, Q., & Wike. (2022). Implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik sebagai upaya penanganan stunting di Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2), 136–144. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.02.1>
- Nurva, L., & Maharani, C. (2023). Analisis pelaksanaan kebijakan penanggulangan stunting: Studi kasus di Kabupaten Brebes. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 12(2), 74-83. <https://core.ac.uk/download/pdf/572862115.pdf>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Bandung: Media Sahabat Cendekia.
- Prayitno, G., Auliah, A., Zuhriyah, L., Efendi, A., Arifin, S., Rahmawati, R., & Nugraha, A. T. (2025). Exploring the role of food security in stunting prevention efforts in the Bondowoso community, Indonesia. *Societies*, 15(5), Article 135. <https://doi.org/10.3390/soc15050135>
- Ridwan, R., & Tungka, N. F. (2024). *Metode penelitian* (L. O. A. Dani, Ed.). Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- Rosanti, L. D. A. (2023). *Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah (Studi Di Kecamatan Sulang)* (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). <http://eprints.ipdn.ac.id/12674/>
- Sahroji, Q. N., Hidayat, R., & Nababan, R. (2022). Implementasi kebijakan Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting di Kabupaten Karawang. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1983>

- Sari, L., Mardiana, Syapsan, Mayes, A., Ningsih, R. B., & Putri, D. D. (2025). Factors influencing stunting among children in Pekanbaru City. *Journal of Ecohumanism*, 4(1), 3563–3572. <https://doi.org/10.62754/joe.v4i1.6199>
- Simangunsong, F. (2017). *Metode penelitian pemerintahan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sunaryo, D. R., Candradewini, C., & Arifianti, R. (2021). Implementasi kebijakan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Bandung. *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, 4(4), 205-213. <https://doi.org/10.24198/responsive.v4i4.34716>
- Utami, F. P., Ruliyandari, R., Agustin, H., & Matahari, R. (2025). Stunting prevention based on local wisdom in Bantul Regency, Yogyakarta, Indonesia. *Social Medicine*, 18(1), 14–26. <https://doi.org/10.71164/socialmedicine.v18i1.2025.1657>
- Warsono, H., Astuti, R. S., & Ardiyansah. (2022). *Metode pengolahan data kualitatif menggunakan Atlas.ti* (Cet. 1). Program Studi Doktor Administrasi Publik, FISIP-UNDIP.

